



**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE PT. PETROKIMIA GRESIK
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 22 S.D. 24 NOVEMBER 2019**

**SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOVEMBER 2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.a. Latar Belakang

Pembangunan industri yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan bergantung pada dua faktor kunci, yakni ketersediaan bahan baku dan pasokan energy. Kedua faktor tersebut, menentukan perkembangan industry di suatu daerah. Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku industri dalam negeri juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri guna mendukung peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Kedepan total kebutuhan gas untuk industri akan terus meningkat seiring dengan rencana pengembangan industri di masa depan. Terlebih, pertumbuhan industri yang dianggap sebagai motor perekonomian akan terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Untuk itu pemerintah menerbitkan beberapa aturan/kebijakan terkait pemanfaatan gas bumi dan infrastruktur gas bumi diantaranya; Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Terbitnya peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan gas untuk industry di dalam negeri.

Peran gas sebagai sumber energi bersih dan sebagai bahan baku industri semakin penting, namun salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kontinuitas pasokan, distribusi, dan harga yang memenuhi aspek keekonomian baik bagi produsen maupun konsumen. Provinsi Jawa Timur yang industrinya terus tumbuh diperhadapkan dengan permasalahan tingginya harga gas dan juga kendala pendistribusiannya.

Adapun konsumen gas bumi terbesar di Jawa Timur adalah; a. Petrokimia Gresik b. Kelistrikan c. Industri & Komersial d. Transportasi (Pertamina dan PGN) e. Gas kota (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto). Khusus kebutuhan gas untuk Petrokimia atau dalam hal ini Petrokimia Gresik dengan beroperasinya dua pabrik yaitu Ammurea I dan Ammurea II, maka kebutuhan gas untuk sektor pupuk dan petrokimia adalah sebesar 150 MMSCFD (Data NGI 2018-2027).

Berdasarkan Neraca Gas Indonesia (NGI) 2018-2027, untuk wilayah Region IV yang meliputi Jawa Bagian Timur, Pasokan gas bumi (*supply*) ke Region IV pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 628.66 MMSCFD dengan rincian *Existing Supply* sebesar 597.42 MMSCFD, *Project Supply* sebesar 11.42 MMSCFD dan *Potential Supply* sebesar 19.82 MMSCFD. Untuk *existing supply* Jawa Timur didominasi pasokan gas dari Kangean Energy Indonesia Ltd. yang memasok 201.77 MMSCFD di tahun 2018 kemudian turun sampai dengan 10.31 MMSCFD

di tahun 2027, PHE WMO sebesar 140 MMSCFD dari tahun 2018–2020 kemudian turun sampai dengan 35 MMSCFD di tahun 2027 dan Husky CNOOC sebesar 100 MMSCFD di tahun 2018 sampai dengan 2027.

Pasar gas bumi di Jawa Timur masih cukup besar, namun pasokan gas dari PGN belum cukup untuk memenuhi seluruh permintaan yang ada. Saat ini, total permintaan gas bumi di Jatim sebanyak 160-170 MMSCFD, sementara pasokan yang dapat dialirkan oleh PGN hanya sebanyak 141 MMSCFD., artinya permintaan gas untuk industri belum semuanya dapat terpenuhi.

Belum terpenuhinya seluruh permintaan gas untuk Industri di Jawa Timur, masalah krisis pasokan gas sudah menghantui, dikarenakan masalah pasokan gas dari hulu berkurang seperti berkurangnya pasokan gas bumi dari beberapa blok migas PHE West Madura Offshore, Keangean Energy Indonesia, Husky CNOOC Madura dan lainnya, dan tertundanya produksi blok migas seperti lapangan Jambaran Tiung Biru 171 MMSCFD karena persoalan lisensi teknologi yang berubah.

Adanya Tren penurunan pasokan tersebut, terutama dari Husky-CNOOC Madura Limited tentunya akan berdampak pada kegiatan operasi PT Petrokimia Gresik, mengingat berdasarkan kontrak perjanjian jual beli yang ditandatangani tersebut, Husky-CNOOC Madura Limited (HMCL) akan memasok gas ke pabrik amoniak-urea II milik PT Petrokimia Gresik sebesar 85 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) dengan harga kontak sebesar 6,5 USD/MMBTU (million metric british thermal unit) dan ada eskalasi kenaikan harga dengan sekitar 2,5 - 3 persen per tahun.

Melihat kondisi-kondisi tersebut, dan berdasarkan kebutuhan gas di Jawa Timur, akan terjadi *defisit supply* dari tahun 2018–2027 untuk kondisi *existing supply*, sehingga perlu dilakukan terobosan untuk mengantisipasi hal tersebut. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja spesifik guna melihat secara langsung kegiatan operasional PT Petrokimia Gresik terutama menyangkut ketersediaan pasokan gas dan pemberlakuan harga keekonomian gas serta menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait.

1.b. Dasar Hukum Kunjungan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 04 November 2019 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 serta merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

1.c. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke PT Petrokimia Gresik di Provinsi Jawa Timur adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai ketersediaan pasokan gas di PT Petrokimia Gresik secara khusus dan Jawa

Timur Secara umum, permasalahan harga keekonomian gas. Serta sejauhmana pengembangan infrastruktur gas di wilayah Gresik dan Jawa Timur secara umum.

1.d. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Petrokimia Gresik di Gresik, Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 22-24 November 2019. Adapun agenda tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Petrokimia Gresik (*Jadwal terlampir*)

1.e. Sasaran dan Hasil Kegiatan

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur adalah:

1. Gambaran umum terkait kegiatan operasional PT Petrokimia Gresik
2. Mendapatkan penjelasan menyangkut ketersediaan dan kontinuitas pasokan gas untuk PT Petrokimia Gresik termasuk besaran kebutuhan impor gas
3. Kondisi beberapa blok migas yang saat ini mensuplai gas di wilayah Jawa Timur
4. Memastikan terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu
5. Mendapatkan penjelasan mengenai rencana pengembangan infrastruktur gas di wilayah Jawa Timur dan Permasalahan yang dihadapi

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ini akan menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait.

1.f. Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan ke PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, diantaranya:

No.	NAMA PESERTA	No.Angg.	FRAKSI	JABATAN
1	Sugeng Suparwoto	373	P. Nasdem	Ketua Tim
2	H. Eddy Soeparno, SH, MH	496	PAN	Wa.Ketua
3	Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM	244	PDI Perjuangan	Anggota
4	H. Yulian Gunhar, SH, MH	148	PDI Perjuangan	Anggota
5	Syafruddin H Maming, S.Sos	248	PDI Perjuangan	Anggota
6	Dra Hj Haeny Relawati Rini, M.Si	321	P.Golkar	Anggota
7	Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc	322	P.Golkar	Anggota
8	Moreno Soeprapto	110	P.Gerindra	Anggota
9	Khaterine A. Oendoen	123	P.Gerindra	Anggota

10	H. Charles Meikyansyah	378	P. Nasdem	Anggota
11	dr. H. Muhammad Zairullah Azhar	55	PKB	Anggota
12	Sartono Hutomo	555	P.Demokrat	Anggota
13	H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH	524	P.Demokrat	Anggota
14	Ir. H. Tifatul Sembiring	411	PKS	Anggota
15	DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc	517	PAN	Anggota

BAB II

PEMBAHASAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kegiatan kunjungan kerja spesifik komisi VII DPR RI ke PT Petrokimia Gresik di Provinsi Jawa Timur yang di pimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI) diawali dengan melakukan pertemuan jajaran PT Petrokimia Gresik dan stakeholder terkait yang bertempat di Wisma Kebomas Kompleks PT Petrokimia Gresik yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik. Pada pertemuan tersebut delegasi Komisi VII DPR RI, diterima oleh Rahmad Pribadi (Dirut PT Petrokimia Gresik) beserta direksi lainnya dan Nugroho Christijanto (Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia), selain itu delegasi Komisi VII DPR RI juga didampingi oleh Djoko Siswanto (Plt Dirjen Migas KESDM), Hary Pratowo (Anggota Komite BPH Migas), Arief S Handoko (Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas), Gigih Prakoso (Dirut PT PGN Tbk), Dinas ESDM Provinsi Jatim, dan kontraktor KKKS. Pada pertemuan tersebut dibahas antara lain menyangkut ketersediaan pasokan gas untuk PT Petrokimia Gresik, antisipasi terhadap potensi kelangkaan pasokan gas, dsb..

Dari serangkaian pertemuan tersebut, tim Komisi VII DPR RI memperoleh berbagai informasi dan penjelasan dari PT Petrokimia Gresik dan stakeholder terkait lainnya, diantaranya:

- PT Petrokimia Gresik saat ini mengoperasikan 31 pabrik dengan total produksi sebesar 8,9 juta ton/tahun dengan perincian sebanyak 3,960 juta ton/tahun untuk non pupuk (amoniak, asam sulfat, asam fosfat, AIF₃, gypsum, cement retarder, CO₂ cair, HCl) dan 5,010 juta ton/tahun untuk pupuk (urea, NPK, ZA, SP-36, ZK dan organic)
- Sumber energi PT Petrokimia Gresik diperoleh dari natural gas/gas bumi, listrik PLN, Batubara, solar dan BBM (untuk transportasi). Jenis energi tersebut dipergunakan sebagai bahan baku proses, generated steam, pembangkit listrik dan bahan bakar
- Sumber gas PT Petrokimia Gresik, berasal dari lapangan KEI TSB, KEI Pagerungan, West Madura Offshore (WMO) dsb. Yang disupply untuk memenuhi kebutuhan pabrik Amurea IA dan Amurea IB



- Balance pasokan dan kebutuhan gas PT Petrokimia Gresik sampai tahun 2030 sebagai berikut;

PERIODE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KEBUTUHAN GAS PKG (MMSCFD)	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
West Madura Offshore (WMO) & Poleng	20	20	20**									
KEI TSB	65	60	30**									
KEI Pagerungan	7	6	5									
HCML BD	40	40										
HCML MDA-MBH			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
HCML MAC			15	15	15	15	15					
MBGI Tanggulangin & Wunut		10	10	10								
Blok Cepu (JTB, Cendana, Alas Tua)			85*	34	44	44	44	59	59	59	59	59
Total Pasokan (Alokasi)	132	136	145	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Delta Kebutuhan	-12	-8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hingga saat ini, supply gas dari HCML untuk Amurea IB belum ada, sehingga balance gas berantakan. Padahal sudah ada kesepakatan supply gas dari HCML sebesar 85 MMBTU. Untuk mengatasi hal tersebut, PT PG mendapatkan supply gas dari Kangean TSB sebesar 65 MMBTU.

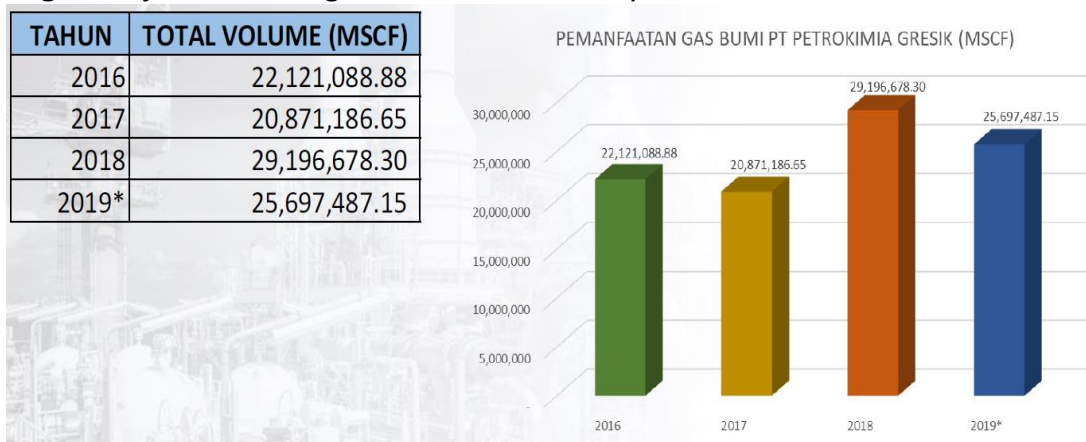
Jika pada tahun 2021 pasokan gas dari HCML MDA-MBH belum *on stream*, maka: Pasokan gas Blok Cepu diharapkan dapat mengalir sebesar 85 MMSCFD, dan Pasokan gas KEI TSB diharapkan dapat dinaikkan dari 30 menjadi 60 MMSCFD dan pasokan dari PHE WMO diperpanjang s.d tahun 2021 dengan volume tetap.

- Untuk supply gas ke Petrokimia Gresik pada tahun 2019-2021 ini disupply dari West Madura Offshore (WMO) & Poleng, Kangean Energi Indonesia Ltd.(Lapangan Terang Sirasun Batur), Kangean Energi Indonesia (Lapangan Pagerungan), HCML (Lapangan BD). Terkait untuk kebutuhan gas setelah tahun 2021, menurut SKK Migas ada 2 skenario yang dapat digunakan yaitu *Skenario1*: Petrokimia Gresik memanfaatkan gas Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) sebesar 85 MMSCFD melalui kontrak dengan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya. *Skenario 2*: Memperpanjang kontrak dengan PHE WMO sebesar 45 MMSCFD atau menambah total pasokan dari KEIL dan memperpanjang pasokan gas dari Lapangan BD KKKS HCML.

Sedangkan untuk pemenuhan jangka Panjang Petrokimia Gresik dilakukan dengan Memanfaatkan potensi gas dari Lapangan Cendana dan Alas Tua Blok Cepu dan/atau Memanfaatkan pasokan LNG dari Hulu (Bontang/BPTanggungh/

Inpex Masela) dengan menggunakan fasilitas *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) di Jawa Timur.

- Petrokimia Gresik mendapatkan pasokan gas bumi dari Kangean Energi Indonesia. Petrokimia Gresik merupakan shipper dari PT Pertamina Gas area Jawa Timur. Dimana gas dibeli langsung dari area Pagerungan, dialirkan melalui pipa PT Pertamina Gas dan digunakan untuk kebutuhan sendiri. Dalam pengaliran gas, ruas pipa yang dilalui adalah ruas Pagerungan-ORF Porong-Gresik (Tarif 0,47 USD), ruas ORF Porong-Gresik (Tarif 0,2 USD), ruas Gresik-PKG Looping (Tarif 0,07 USD), dan ruas Semare - Porong Kp 19.4 – Grati (Tarif 0,52 USD). PT PG memperoleh gas dengan membeli seharga 7,34 USD/MMBTU. Harga tersebut, merupakan harga jual rata-rata untuk wilayah Jawa Timur
- Adapun Volume pemanfaatan untuk PT Petrokimia Gresik periode Januari sd September 2019 adalah sebesar 25.697.487,15 MSCF, atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.



- Dukungan yang dibutuhkan oleh PT Petrokimia Gresik terkait permasalahan pasokan gas adalah;

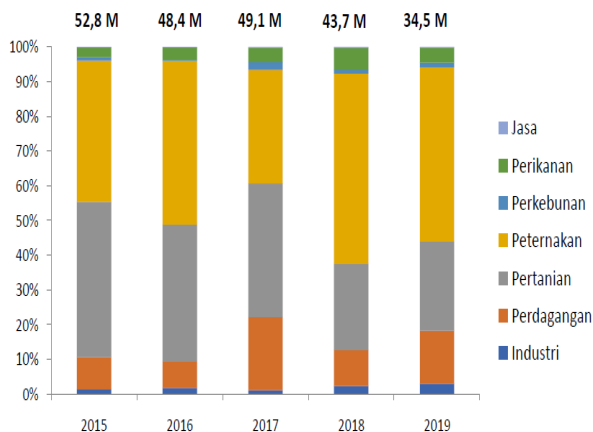
Permasalahan Gas	Bentuk Dukungan
Shortage pada tahun 2021	Tambahan alokasi gas tahun 2021, KEI –TSB dari 30 MMSCFD menjadi 60 MMSCFD dan PHE WMO sebesar 20 MMSCFD
Belum ada reliable and confirmed supply untuk tahun 2022 keatas	- Kepastian proyek HCML (MAC dan MDA – MBH) - Alokasi Gas JTB/Cendana/Alas Tua mulai Tahun 2022 pasca berakhirnya kontrak KEI – TSB Fase 2
Harga Gas dan Tarif Pengangkutan Gas	Mengacu Perpres No. 40 Tahun 2016

- Tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik terkait permasalahan social, baku mutu lingkungan, dan produksi versus penjualan.

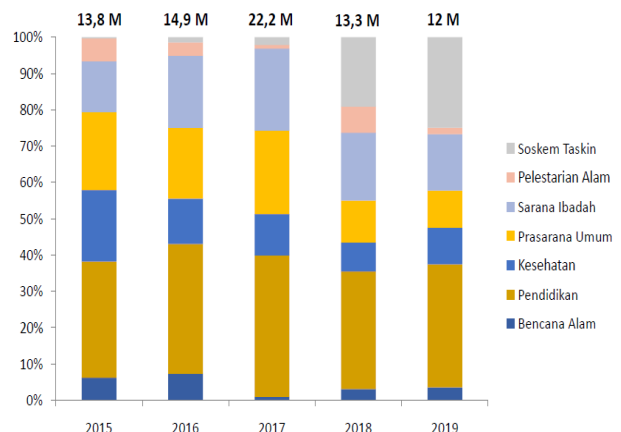
	Lokasi pabrik dekat dengan penduduk (Sosial)	Peraturan yang semakin ketat (Baku mutu semakin ketat)	Produksi yang lebih tinggi dibanding penjualan (Market volume dan market share gypsum lebih rendah dari produksi)
Tantangan	Pengendalian operasional yang baik	Teknologi lama dan perlu penyempurnaan	Pemanfaatan terbatas pada industry semen dan gypsum pertanian
Upaya Perbaikan	- Preventive Maintenance - Relokasi penduduk sekitar pabrik Amoniak urea IB	Penambahan unit flokulasi dan koagulasi untuk penyempurnaan kualitas limbah	Pengajuan ijin pengecualian gypsum

- Terkait rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PT FI) di sekitar wilayah PT Petrokimia Gresik. Telah ada MoU sewa lahan (untuk jangka waktu 20 Tahun) PT Petrokimia Gresik (PT PG) jangka Panjang oleh PT FI pada tanggal 22 Januari 2015. Dalam perjanjian tersebut luas lahan yang akan disewa seluas 100 Ha. Namun karena rentan waktu yang cukup lama belum ada progress pembangunan smelter, maka pada tanggal 31 Januari 2018 PT PG melakukan pengakhiran perjanjian dengan PT FI. Padahal jika pembangunan smelter tersebut terlaksana, PT PG akan memperoleh pasokan limbah smelter berupa asam sulfat sebesar 2 juta MTPY yang akan diolah di storage PT PG untuk menjadi pupuk. Mengingat saat ini untuk memenuhi kebutuhan asam sulfat PT PG sebagian diimpor dari timur tengah dan Kanada
- Penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan PT PG dari tahun 2015 hingga 2019 kecenderungannya mengalami penurunan dari tahun-ketahun.

Penyaluran program kemitraan PT PG Tahun 2015 - 2019



Penyaluran program Bina Lingkungan PT PG Tahun 2015 - 2019



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil dari kegiatan kunjungan kerja spesifik tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk di tindaklanjuti, diantaranya;

1. PT Petrokimia Gresik saat ini mengoperasikan 31 pabrik dengan total produksi sebesar 8,9 juta ton/tahun dengan perincian sebanyak 3,960 juta ton/tahun untuk non pupuk dan 5,010 juta ton/tahun untuk pupuk
2. Sejak tahun 2018, PT Petrokimia Gresik (PT PG), menghadapi permasalahan terkait ketersediaan pasokan gas. Supply gas dari HCML untuk Amurea IB belum ada hingga saat ini. Padahal sudah ada kesepakatan supply gas dari HCML sebesar 85 MMBTU. Untuk mengatasi hal tersebut, PT PG mendapatkan gas dari Kangean TSB sebesar 65 MMBTU.
3. PT Petrokimia Gresik menghadapi kekurangan pasokan gas pada tahun 2021 dan belum tersedianya kepastian supply untuk tahun 2022 keatas. Terkait hal tersebut, menurut SKK Migas ada 2 skenario yang dapat digunakan yaitu *Skenario1*: Petrokimia Gresik memanfaatkan gas Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) sebesar 85 MMSCFD melalui kontrak dengan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya. *Skenario 2*: Memperpanjang kontrak dengan PHE WMO sebesar 45 MMSCFD atau menambah total pasokan dari KEIL dan memperpanjang pasokan gas dari Lapangan BD KKKS HCML.
Sedangkan untuk pemenuhan jangka Panjang PT Petrokimia Gresik dapat Memanfaatkan potensi gas dari Lapangan Cendana dan Alas Tua Blok Cepu dan/atau Memanfaatkan pasokan LNG dari Hulu (Bontang/BPTanggung/ Inpex Masela) dengan menggunakan fasilitas *Floating Storage Regasification Unit (FSRU)* di JawaTimur.
4. PT Petrokimia Gresik mendapatkan gas dengan harga sebesar 7,34 USD/MMBTU. Harga tersebut, merupakan harga jual rata-rata untuk wilayah Jawa Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu yang mematok harga 6 USD/MMBTU.
5. Ketidakjelasan pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PT FI) di wilayah PT PG, mengakibatkan PT PG melakukan pengakhiran perjanjian dengan PT FI pada tanggal 31 Januari 2018. Padahal jika smelter tersebut dibangun, PT PG akan menerima pasokan asam sulfat sebesar 2 juta MTPY yang sangat dibutuhkan untuk pembuatan pupuk, mengingat sebagian kebutuhan asam sulfat diperoleh melalui import dari timur tengah dan kanada
6. Penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan PT PG dari tahun 2015 hingga 2019 kecenderungannya mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Dimana untuk program kemitraan dialokasikan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 34,5 Miliar atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 43,7 Miliar. Begitu juga untuk program Bina Lingkungan, dimana pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp 12 Miliar

atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13,3 Miliar

Adapun rekomendasi dari hasil Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, antara lain:

1. Mengingat kondisi pasokan dan kebutuhan gas bumi kedepan, serta LNG yang belum terserap secara maksimal di dalam negeri, maka dibutuhkan adanya kebijakan khusus mengenai LNG berupa pasokan dan harga patokan khusus untuk dalam negeri
2. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan DMO terutama kepada KKKS dengan jumlah produksi yang besar. Misalnya dari blok Tangguh
3. Terkait pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, akan didalami didalam Raker atau RDP dengan Kementerian ESDM cq Dirjen Minerba KESDM
4. Harga gas bumi di untuk industry petrokimia dan pupuk yang tidak sesuai dengan Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu, akan didalami di dalam Raker atau RDP dengan Kementerian ESDM cq Dirjen Migas KESDM

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Petrokimia Gresik di Provinsi Jawa Timur, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 November 2019. Semoga laporan hasil Kunjungan Kerja Spesifik ini memberi manfaat untuk kita semua..

Jakarta, November 2019
Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

.....